



# PROSIDING

## SEMINAR NASIONAL

### — TEMA —

“ Revitalisasi Nilai Budaya dan Sejarah Bahari Banten  
Sebagai *National Character Building* ”

 Serang, 27 Maret 2019

### Penulis :

Ana Nurhasanah, M.Pd  
Yuni Maryuni, M.Pd  
Dkk

### Editor :

M. Ilham Gilang, M.Pd  
Nashar, M.Pd  
Tb. Umar Syarif Hadi Wibowo, M.Pd



Jurusan  
**Pendidikan Sejarah**  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

# **PROSIDING**

## **SEMINAR NASIONAL**

### **“REVITALISASI NILAI BUDAYA DAN SEJARAH BAHARI BANTEN SEBAGAI NATIONAL CHARACTER BULIDING”**

**Serang, 27 Maret 2019**

**Editor :**

**Ana Nurhasanah, M.Pd**

**Yuni Maryuni, M.Pd**

**M. Ilham Gilang, M.Pd**

**Nashar, M.Pd**

**Tb. Umar Syarif Hadi Wibowo, M.Pd**

Prosiding Seminar Nasional  
“Revitalisasi Nilai Budaya dan Sejarah Bahari Banten Sebagai *National Character Buliding*”  
ISBN 978-623-90565-5-1  
Cetakan Pertama, April 2019

**Diterbitkan oleh :**

**Media Edukasi Indonesia (Anggota IKAPI)**

Jalan Lingkar Caringin Cisoka Tangerang Banten Kode Pos 15730

*E-Mail:* indonesiamediaedukasi@gmail.com

© Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun

Tanpa ijin tertulis dari penerbit

**PANITIA SEMINAR NASIONAL SEJARAH REVITALISASI NILAI BUDAYA DAN  
SEJARAH BAHARI BANTEN SEBAGAI NATIONAL CHARACTER BUILDING**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2019**

Penanggung Jawab : Dr. H. Aceng Hasani, M.Pd

Pengarah : Dr. Suroso Mukti Leksono, M.Si

Dr. Aan Hendrayana, M.Pd

Dodi Firmansyah, M.Pd

Ana Nurhasanah, M.Pd

Ketua : Nashar, M.Pd

Sekretaris : M. Ilham Gilang, M.Pd

Anggota : 1. Yuni Maryuni, M.Pd

2. Eko Ribawati, M.Pd

3. Rikza Fauzan, M.Pd

4. Arif Permana Putra, M.Pd

5. Tb. Umar Syarif Hadi Wibowo, M.Pd

Desain Sampul : Robi Rabbani

Editor : M. Ilham Gilang, M.Pd

Nashar, M.Pd

Tb. Umar Syarif Hadi Wibowo, M.Pd

## KATA PENGANTAR

Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menggelar Seminar Nasional dan *Call for Papers* dengan tema “**Revitalisasi Nilai Budaya dan Sejarah Bahari Banten sebagai National Character Building**”. Seminar nasional ini merupakan salah satu program dari Jurusan Pendidikan Sejarah Untirta. Seminar dibuka oleh sambutan Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah, Ibu Ana Nurhasanah, M. Pd, dilanjutkan Dekan FKIP Untirta Bapak Dr. H. Aceng Hasani, M.Pd. Seminar dilaksanakan dalam dua sesi, yaitu sesi pleno dan sesi paralel. Pada sesi pleno hadir sebagai Pembicara Utama, yaitu Prof. Dr. Susanto Zuhdi, M.Hum, Pakar/Sejarawan Maritim dan Bahari Universitas Indonesia. Sementara itu, sesi paralel merupakan pemaparan makalah yang berasal dari berbagai perguruan tinggi, praktisi dan pakar yang dibagi dalam dua sub-tema, yaitu Penelitian Sejarah Maritim dan Nilai Budaya Dalam Pembelajaran Sejarah.

Ditinggalkannya kebudayaan maritim merupakan salah satu isu strategis yang harus diperhatikan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, maupun masyarakat umum. Wilayah Banten dapat dijadikan sebagai contoh kasus karena dalam sejarahnya, Banten adalah satu dari sekian kerajaan maritim besar di Nusantara. Namun, setelah takluk oleh Belanda, orientasi penguasa dan masyarakat Banten berubah menjadi masyarakat agraris dengan pandangan daratan sebagai pusat aktivitas ekonomi dan kebudayaan. Laut tidak lagi menjadi orientasi, laut sebagai latar depan dilupakan posisi dan nilai pentingnya. Arti penting permasalahan kelautan dan maritim yang kaitannya dengan sejarah dan pembangunan karakter nasional penting untuk terus dikaji secara komprehensif sehingga muncul ide dan solusi akan permasalahan pewarisan nilai dan identitas nasional.

Hadirnya buku prosiding ini sebagai upaya memberi sumbangsih bagi khazanah perkembangan kemaritiman dalam konteks penelitian ilmu sejarah, pembelajaran sejarah dan pembelajaran maritim. Akhirnya, buku ini merupakan sedikit sumbangsih kami, para akademisi, pakar, dan praktisi pendidikan bagi keberlanjutan visi Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia” dan pembangunan karakter nasional. Secara khusus pula, kami berharap dapat memberi sumbangsih pemikiran bagi kemajuan Untirta dan pembangunan Provinsi Banten yang sedang bergeliat maju dengan kombinasi karakter “*Jawara*” yang “*Berakhlakul Kharimah*”.

Tim Penulis /  
Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah Untirta,

Ana Nurhasanah, M.Pd

## DAFTAR ISI

<b>PENGETAHUAN BENCANA ALAM MASA LALU SELAT SUNDA : ETNOPEDAGOGI SEBAGAI MITIGASI BENCANA</b> Arif Permana Putra	<b>7</b>
<b>KAJIAN NILAI PADA TOPONIMI NAMA-NAMA JALAN DI KOTA SERANG SEBAGAI POTENSI SUMBER BELAJAR SEJARAH</b> Tubagus Umar Syarif Hadi Wibowo dan Ana Nurhasanah	<b>13</b>
<b>AKTUALISASI KESENIAN UBRUG SEBAGAI SALAH SATU KHASANAH NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL BANTEN</b> Eko Ribawati dan Agus Rustaman	<b>28</b>
<b>INTERNALISASI NILAI KEARIFAN LOKAL MELALUI <i>ETHNOPEDAGOGY</i> (KAJIAN KEBUDAYAAN SUNDA DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH)</b> Rikza Fauzan dan Nashar	<b>48</b>
<b>INTERNALISASI NILAI PATRIOTISME MELALUI PEMBELAJARAN SEJARAH PADA PESERTA DIDIK KELAS X IPS DI SMA MUHAMMADIYAH 1 PANCORAN MAS</b> Yusuf Budi Prasetya Santosa dan Fahmi Hidayat	<b>63</b>
<b>NILAI FILOSOFIS DALAM SEJARAH KOPERASI SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL</b> Ahmad Habibi Syahid	<b>69</b>
<b>PERANAN PEREMPUAN DALAM PELESTARIAN NILAI-NILAI BUDAYA DI KASEPUHAN ADAT CITOREK</b> Weny Widyawati dan Aan	<b>79</b>
<b>PEMBELAJARAN SEJARAH MARITIM: WACANA DAN TANTANGAN BAGI MASYARAKAT PESISIR</b> Yuni Maryuni dan Muhammad Ilham Gilang	<b>88</b>

<b>HUTAN LAHAN ULUN SAIBATIN BUDAYA PEREKONOMIAN MASYARAKAT LOKAL DI PESISIR BARAT LAMPUNG</b>	<b>95</b>
Henry Susanto, Anisa Septianingrum, Sumargono	
<b>TRADISI GREBEG SUDIRO SEBAGAI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN PENGHARGAAN ATAS KEBHINEKAAN DI SURAKARTA</b>	<b>106</b>
Sumargono, Henry Susanto, Anisa Septianingrum	
<b>SEJARAH TSUNAMI DI SELAT SUNDA SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR BANTEN</b>	<b>116</b>
Ferry Dwi Cahyadi	
<b>WAHYU SEBAGAI SUMBER SEJARAH</b>	<b>121</b>
Aden Sutiapermana	
<b>PEMANFAATAN KAPAL KARAM SEBAGAI DESTINASI SELAM DALAM KAIDAH CAGAR BUDAYA BAWAH AIR</b>	<b>129</b>
Agung Setyo Sasongko	



# HUTAN LAHAN ULUN SAIBATIN BUDAYA PEREKONOMIAN MASYARAKAT LOKAL DI PESISIR BARAT LAMPUNG

*Henry Susanto<sup>1</sup>, Anisa Septianingrum<sup>2</sup>, Sumargono<sup>3</sup>*

<sup>1</sup> Dosen Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lampung  
Email: henry.susanto@fkip.unila.ac.id

<sup>2</sup> Dosen Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lampung  
Email: anisa.septianingrum@fkip.unila.ac.id

<sup>3</sup> Dosen Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lampung  
Email: sumargono.1988@fkip.unila.ac.id

**Abstract:** The purpose of this study was to understand Saibatin's culture perspective from West Lampung regarding forests related to the agricultural system, the causes of forest destruction in Bukit Barisan Selatan National Park, and the government's response to efforts to save forests in Bukit Barisan Selatan National Park. This study uses qualitative methods that refer to an ethnographic writing. Operational technical uses a genetic structuralism approach. The result: (1) the damage to the Bukit Barisan Selatan National Park forest was not caused by the economic activities of the ulun Saibatin community or the HPH businessmen; (2) forest damage caused by the law on forestry in West Lampung is not adhered to the evidence that there are many forest looting activities; and (3) the problem of unemployment of people living in forest conversion areas needs to be addressed immediately.

**Keyword:** *culture, economic activity, forest destruction, ulun Saibatin.*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk memahami perspektif ulun Saibatin dari Lampung Barat mengenai hutan terkait dengan hukum adat dan sistem pertaniannya; (2) penyebab kerusakan hutan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS); (3) peranan pemerintah dalam upaya penyelamatan hutan di TNBBS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merujuk pada sebuah penulisan etnografi. Teknis operasional menggunakan pendekatan Strukturalis Genetik. Hasilnya, kerusakan hutan di kawasan TNBBS bukan disebabkan oleh aktivitas ekonomi masyarakat ulun Saibatin ataupun pengusaha HPH, perundang-undangan tentang kehutanan di Lampung Barat tidak ditaati dengan bukti banyaknya penjarahan hutan, dan masalah pengangguran penduduk yang tinggal di kawasan konversi hutan perlu segera diatasi.

Kata kunci: *kebudayaan, aktivitas ekonomi, pengrusakan hutan, ulun Saibatin.*

## Pendahuluan

Pengertian kebudayaan menurut Zoetmulder (1951: 7) adalah daya dari budi atau kekuatan dari akal yang dibiasakan dengan proses belajar yang berlangsung dari waktu ke waktu sehingga memungkinkan manusia untuk mempunyai gagasan, berkarya, dan

menghasilkan sesuatu. Kebudayaan secara garis besar terdiri dari tiga wujud, yaitu: kebudayaan sebagai tata kelakuan manusia, kebudayaan sebagai kelakuan manusia, kebudayaan sebagai hasil kelakuan manusia (Koentjaraningrat, 1975:45). Tata kelakuan akan menjadi pedoman bagi perilaku, dan pada

gilirannya perilaku akan memunculkan hasil dari tingkah laku.

Kebudayaan meliputi bagaimana mereka berpakaian, adat kebiasaan perkawinan mereka dan kehidupan keluarga, pola-pola kerja mereka, upacara-upacara keagamaan dan pencarian kesenangan. Kebudayaan meliputi juga barang-barang yang mereka ciptakan dan yang bermakna bagi mereka – busur dan anak panah, bajak, pabrik dan mesin, komputer, buku, tempat kediaman (Gidden, 1991: 31-32). Sejalan dengan pendapat tersebut, Gazalba (1979 : 72) mendefenisikan kebudayaan sebagai “cara berfikir dan cara merasa atau kebudayaan bathiniah yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan sekelompok manusia, yang membentuk kesatuan social dalam suatu ruang dan satu waktu.

Pengertian mengenai nasib manusia pada kehidupan masyarakat agraris biasanya amat kuat bersumber dari budaya mereka yang tidak aktif terhadap alam sekelilingnya. Petani biasanya tidak merasa tunduk terhadap alam; akan tetapi sebaliknya mereka juga tidak merasa mampu untuk menundukkan alam (Koentjaraningrat, 1975: 15). Akhirnya, konsepsi bahwa untuk kesejahteraan yang berkesinambungan orang itu harus hidup selaras dengan alam sangatlah kuat mendasari pola pikir, tingkah laku, dan wujud segala sesuatu yang mereka hasilkan.

Kebudayaan pada masyarakat agraris dengan demikian jelas mengajarkan bahwa kehidupan manusialah yang harus menyesuaikan diri atau menyelaraskan dengan alam. Bukan sebaliknya, alam yang harus

menyesuaikan diri dengan segala kebutuhan kehidupan manusia. Persoalan nasib manusia saat ini dan kelanjutannya, dipercayai erat sekali berhubungan dengan nasib alam saat ini dan di kemudian hari.

Pengertian mengenai budaya yang tidak aktif terhadap alam, secara ekstrim mungkin dapat ditafsirkan bahwa alam adalah penyedia “mangsa” bagi kehidupan manusia, dan bukanlah alam itu sendiri sebagai “mangsa” kehidupan manusia. Berdasarkan tafsir tersebut, bisa diasumsikan bahwa manakala budaya berubah menjadi aktif (diaktifkan) terhadap alam (alam menjadi “mangsa” kehidupan manusia), maka yang akan terjadi adalah krisis alam dan selanjutnya akan berdampak pada terjadinya krisis nasib bagi manusia.

Namun, budaya tidaklah bersifat statis. Budaya juga mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan perjalanan waktu kehidupan manusia, baik karena dorongan dari dalam maupun dorongan dari luar. Interaksi antara komponen-komponen budaya dapat memungkinkan timbulnya orientasi-orientasi budaya yang baru, dan demikian juga interaksi budaya dengan pengaruh-pengaruh dari luar seringkali dapat mempengaruhi orientasi sebuah budaya (Kuntowijoyo, 1999). Orientasi budaya terhadap alam yang semula bersifat tidak aktif, dapat bergeser menjadi sebuah orientasi baru yang sifatnya aktif terhadap alam. Nilai-nilai keselarasan kehidupan manusia terhadap alam menjadi tak terjaga lagi sehingga alam menjadi “mangsa” habis-habisan bagi kehidupan manusia.

Bukti konkret bahwa manusia baik secara komunal maupun individu menjadi pemicu pergeseran orientasi dari pasif menjadi aktif menjadikan alam sebagai mangsa terlihat dalam tindakan yang bermotif mencari sumber makanan. Salah satu tempat yang menyediakan kebutuhan pangan bagi manusia tanpa perlu pengelolaan adalah hutan. Ekosistem yang hidup di hutan memberikan manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup manusia. Sebab, selain menyediakan kebutuhan pangan, hutan yang kaya juga menyediakan kayu dan lahan untuk kegiatan pertanian. Permasalahannya, hutan yang terlalu sering dijamah terindikasi mengalami kerusakan.

Setiap kali terjadi kasus kerusakan hutan, selalu saja penduduk sebagai peladang di sekitarnya yang dituding sebagai penyebabnya. Baik itu berupa kebakaran hutan maupun terjadinya penggundulan lahan hutan. Pandangan tersebut diperkuat dengan argumentasi bahwa perlادangan berpindah dianggap pemerintah sebagai sumber api kebakaran hutan dan penyebab terjadinya penebangan hutan secara liar.

Lingkup penelitian ini mengangkat persoalan pembangunan yang menyangkut masalah hubungan antara manusia dan hutan. Kajian yang dibahas adalah sifat penyesuaian atau adaptasi petani tradisional *Ulun Saibatin* Lampung Barat terhadap lingkungan hidupnya yang berdekatan dengan kawasan hutan. Pentingnya penelitian ini bertujuan untuk mencari penyebab kerusakan hutan. Sebab, selama ini penduduk *Ulun Saibatin* selalu mendapat tuduhan atas kerusakan hutan yang terjadi karena sistem pertanian ladang berpindah yang

mereka kelola. Apalagi Lampung Barat merupakan bagian dari konversi lingkungan alam Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang dilindungi pemerintah. Meski demikian, kerusakan kawasan mencapai 40% dari total luas hutan konversi yang ada.

## Metode Penelitian

Tulisan ini mempergunakan metode kualitatif di dalam menelusuri kebudayaan *ulun* Lampung Saibatin, sebagai sebuah pranata yang mengatur, mengendalikan, dan memberi arah aktivitas kehidupan mereka. Aplikasi metode kualitatif ini merujuk pada tujuan utama sebuah penulisan etnografi, yaitu untuk memahami sudut pandang penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan, sehingga akan dapat diperoleh informasi mengenai pandangan mereka tentang dunianya (Spradley, 1997: 3). Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara, yaitu: pengamatan terlibat (observasi partisipan) dan dilengkapi wawancara mendalam (*indepth interview*).

Semua aktivitas manusia merupakan respon dari subyek kolektif maupun individu dalam ruang dan waktu tertentu yang merupakan kreasi atau percobaan untuk memodifikasi situasi (ruang dan waktu) yang ada agar cocok dengan aspirasinya. *World view* (pandangan dunia) dengan demikian merupakan struktur bermakna yang terikat oleh ruang dan waktu, dan oleh karenanya bersifat *historis* (Goldman, 1973: 156). Sudut pandang untuk melihat sebuah *world view* (pandangan dunia) dengan jalan mencari struktur dari fakta kemanusiaan yang terikat oleh ruang dan waktu tertentu disebut dengan pendekatan *Strukturalism Genetic* (Junus, 1986: 15).

Teknis operasional pendekatan *Strukturalism Genetic*, didasari dua asumsi kerangka hubungan, yaitu :

Pertama, terdapat hubungan antara makna suatu unsur dengan unsur yang lain dalam sebuah aktivitas yang sama; Kedua, hubungan tersebut membentuk jaring-jaring (struktur) yang saling mengikat (Goldmann, 1973: 156). Apabila kesatuan telah diketemukan, kemudian dianalisis hubungannya dengan latar belakang sosialnya, akan diperoleh *world view* (pandangan dunia) dari sebuah aktivitas (Junus, 1986: 26).

Validasi data yang diperoleh pada dua kegiatan di atas kemudian diuji silangkan (*crosscek*), sehingga akan diperoleh data yang benar-benar mencerminkan atau mewakili pandangan (*mind*) kolektif Saibatin. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan *prime etnografi*, yaitu dimulai dari unsur yang konkret menuju hal-hal yang lebih abstrak dengan mempergunakan logika perpikir dari induktif ke deduktif, sehingga akan diperoleh *native's point of view* (pandangan pokok).

## Hasil dan Pembahasan

### Orientasi Budaya dan Kehidupan Ekonomi

Sebagaimana etnis Lampung pada umumnya, *ulun* Saibatin menganut sistem kekerabatan *patrilinea-primogenitur*, artinya bahwa seluruh harta pusaka tanah, rumah, pekarangan, serta seluruh harta kekayaan sebuah keluarga hanya akan diwariskan pada anak laki-laki tertua (Imron, 2001). Dengan demikian, harta pusaka tanah tidak pecah terbagi-bagi. Anak laki-laki lainnya tidak mendapat warisan harta pusaka, dan apabila mereka tetap tinggal di desa sebagai petani, mereka hanya sebagai petani penggarap tanah pusaka yang dikuasai oleh kakak laki-laki tertua mereka. Meskipun demikian, realitas di lapangan lebih banyak menunjukkan bahwa mereka

lebih suka pergi merantau meninggalkan desanya untuk mencari takdir kehidupannya sendiri.

Inti penduduk desa, dari sebuah kolektif *ulun* Saibatin adalah para lelaki anak tertua sebagai penguasa harta pusaka keluarga yang tidak terpecah-pecah. Mereka tetap tinggal di desa dan menyebabkan bahwa di setiap desa Saibatin tersebut terdapat suatu golongan warga desa inti yang mantap, yang mempunyai rasa tanggung jawab yang maksimal terhadap seluruh warisan harta pusaka keluarga (terutama tanah), dan yang merasakan suatu loyalitas yang besar terhadap komunitinya. Kecuali mantap karena suatu mobilitas yang minimal dari golongan inti penduduk desa, yang disebabkan oleh karena unsur dasar dalam struktur sosialnya, jumlah penduduk desa juga mantap sepanjang masa oleh karena sistem sosial yang berlaku.

Berpijak dari sistem kekerabatan *ulun* Saibatin di Lampung Barat, maka secara teoritis jumlah penduduk inti desa sebagai petani pemilik tanah (lahan pertanian) tidaklah bertambah. Demikian juga warisan pusaka keluarga dalam bentuk tanah untuk pertanian tidaklah mungkin mengalami perluasan areal. Pertambahan dalam hal jumlah (bukan luasan) berkenaan dengan tanah milik memang dimungkinkan dengan jalan pembelian tanah dari klen lain. Namun, yang demikian tersebut sangat jarang ditemui, mengingat bentuk penjualan warisan tanah pusaka sangatlah jarang terjadi oleh sebab adanya rasa tanggung jawab atas "nilai" warisan leluhur bagi sebuah klen yang sangat dijunjung tinggi oleh *ulun* Saibatin.

Aktivitas pertanian asli *ulun* Saibatin adalah berkebun dengan tanaman budidaya bernilai jual tinggi seperti: lada, kopi, cengkeh, damar dan berladang (tanaman pangan). Kebun mereka bersifat komersial, sedangkan pertanian ladang pada *ulun* Saibatin sifatnya adalah *subsisten* atau hanya untuk pemenuhan kebutuhan pangan (tidak diperdagangkan). Perkebunan dilakukan pada lahan-lahan pertanian yang diwarisi dari para *primus interparis* (cikal-bakal) terdahulu di setiap *pekon/tiyuh* (kampung/desa) yang kuantitas luasannya tidak pernah bertambah dari dulu hingga sekarang, sedangkan perladangan pangan dilakukan secara berpindah gilir pada lahan-lahan hutan yang terletak tidak jauh dari aliran sungai.

Kebun-kebun *ulun* Saibatin biasanya letaknya dekat dengan areal hutan sejak para *pioner* pembuka sebuah *pekon/tiyuh*, jauh sebelum republik ini ada, dan bahkan jauh sebelum kedatangan kolonialisme Eropa di Lampung. Kebun-kebun tersebut dahulunya adalah bagian lahan hutan yang subur yang dipilih dan dianggap cocok untuk tanaman-tanaman bernilai ekonomis oleh mereka. Sebenarnya, asal-usul kampung-kampung tua yang ada itupun dibentuk oleh para *pioner* *ulun* Saibatin dengan jalan membuka lahan-lahan hutan yang ada

Mengenai aktivitas asli perkebunan tanaman bernilai jual tinggi pada *ulun* Saibatin, kemungkinan besar tidak terlepas dari karakteristik daerah Lampung Barat yang selain luas dan subur tanahnya, secara geografis terletak pada posisi yang strategis. Lampung Barat merupakan daerah yang berada di

pesisir barat Pulau Sumatera bagian selatan, dan mempunyai pantai yang landai sebagai tempat persinggahan rute pelayaran perdagangan beranting dari Malaka-Aceh-Minangkabau-Lampung-Jawa. Karakter pertanian *ulun* Saibatin dengan demikian terbentuk dalam konteks sebagai masyarakat pertanian di daerah lalu lintas perdagangan yang cenderung terbuka<sup>18</sup> dan mudah dijangkau oleh konsumen kawasan luar Lampung.

Daerah Lampung Barat dalam kedudukannya sebagai daerah jalur pelayaran perdagangan yang menghubungkan Sumatera dan Jawa, serta ditopang dengan kondisi tanah yang subur, telah membentuk penduduknya menjadi sebuah masyarakat *entrepreneur* yang cukup maju. Pertanian tanaman bernilai ekonomis seperti: lada, cengkeh, damar, kopi, dan rotan, sangat berkembang di Lampung Barat. Melimpahnya komoditi tanaman ekonomis tersebut serta letak geografis yang strategis menjadikan Lampung Barat sejak lama sebagai sebuah bandar perdagangan hasil tanaman-tanaman bernilai ekonomis yang ramai.

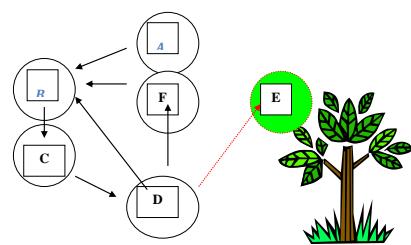
Sistem perladangan pada tanaman pangan dilakukan secara rotasi. Perladangan tanaman pangan yang dilakukan secara berpindah-pindah dari lokasi lahan yang satu ke lahan yang lain merupakan salah satu aspek dari strategi adaptasi ekologis dalam pertanian pangan pada *ulun* Saibatin. Kearifan ekologis dalam sistem perladangan ini justru terletak pada caranya yang berpindah-pindah lahan, tujuannya adalah mengistirahatkan lahan tanah-hutan ladang yang telah dibuka atau diolah

beberapa kali dalam siklus ladang, kemudian ditinggalkan dalam rentang waktu beberapa tahun sebelum dipergunakan lagi sebagai lahan perladangan (Lahajir, 2001: 48).

Perladangan pada *ulun* Saibatin hanya dilakukan pada lahan-lahan yang tidak jauh dari sungai atau tidak masuk ke dalam hutan, juga kuantitas lahan yang dipergunakan tidaklah besar. Perladangan tanaman pangan pada *ulun* Saibatin yang sifatnya *subsisten* tentunya tidaklah memerlukan areal yang luas, sebab jumlah kepala yang harus dihidupi cenderung stabil (tetap), yaitu penduduk inti desa dan keluarganya. Sistem perladangan *ulun* Saibatin terdiri dari aktivitas sebagai berikut: pemilihan lahan, penebasan, pembakaran, penanaman padi, *ngerepong*. Tiga aktivitas yang pertama merupakan kegiatan pembersihan vegetasi-vegetasi lama, sedangkan dua aktivitas terakhir merupakan kegiatan kontrol terhadap vegetasi-vegetasi baru. Aktivitas-aktivitas tersebut tampak sebagaimana sebuah peniruan terhadap sistem suksesi pertumbuhan kembali secara alamiah, yaitu dengan adanya teknis pemutus-api (*firebreaks*) sebagaimana yang dilihat pada *setting* lingkungan alam di sekitar mereka.

Pemilihan lokasi untuk lahan cenderung pada areal yang tidak terlalu jauh dari aliran sungai, dan yang letaknya lebih rendah dari sungai tersebut. Biasanya dipilih areal yang cukup terbuka sehingga cukup sinar matahari dan sedapat mungkin menghindari lokasi yang banyak ditumbuhi tanaman keras untuk memudahkan penggerjaan pengolahannya. Oleh sebab itu biasanya

pula bentuk lahan-lahan perladangan *ulun* Saibatin tidak beraturan, tidak sebagaimana sawah-sawah di Jawa. Pondok sederhana didirikan di dekat ladang dari kayu-kayu bekas tebangan beberapa tanaman keras yang ada di areal calon ladang, untuk tempat tinggal sementara selama berlangsungnya proses penggarapan lahan hingga proses pemanenan selesai. Hasil panen yang diperoleh dibawa ke *pekon/tiyuh* tempat domisili tetap mereka.



Gambar 1. Sistem Ladang *Ulun* Saibatin

Keterangan:

A= Pemilihan Lahan	B=
Menebas	C= Membakar
D= Penanaman Padi	E=
Repong	F= Pemilihan
Lahan Baru Untuk 3 - 4 kali	

Musim Tanam (2 tahun)

### Persepsi tentang Hutan

Pandangan atau pemahaman *ulun* Saibatin mengenai hutan dapat diketahui dari kategori fungsi hutan bagi mereka. *Ulun* Saibatin mempunyai anggapan bahwa hutan dan lahan harus dilihat kegunaannya secara bersamaan, artinya bahwa lahan tidak mempunyai makna apabila tidak dilihat sekaligus dengan hutannya. Bagi *ulun* Saibatin, makna

antara hutan dan lahan tidak terpisahkan. Dengan demikian, dalam hal pemanfaatan lahan-hutan harus dilihat feadahnya secara bersama-sama.

Pada konteks kehidupan ekonomi *ulun* Saibatin, hutan mempunyai fungsi sebagai berikut: (1)Hutan sebagai lahan subsisten, yaitu hutan untuk lokasi ladang padi dan pemenuhan kebutuhan kayu untuk tempat tinggal sendiri. *Ulun* Saibatin pada dasarnya tidak menjadikan bahan pangan (beras) dan bahan bangunan (kayu) sebagai komoditi untuk diperjualbelikan; (2)Hutan sebagai lahan ekonomis klen, yaitu hutan untuk lahan perkebunan (kopi, cengkeh, lada, damar dll). Hasil pemanfaatan hutan kategori inilah yang diperdagangkan *ulun* Saibatin; (3)Hutan sebagai lahan ekonomis umum (lintas klen), yaitu hutan untuk diambil hasil non kayu (damar, karet, rotan, madu, dll) untuk diperdagangkan; (4)Hutan *repong* yaitu hutan buah-buahan (bekas lahan-lahan perladangan). Hasil buah-buahan yang diambil dapat dimanfaatkan untuk dijual (bersifat ekonomis) maupun untuk dikonsumsi sendiri (bersifat subsisten).

Selain berdasarkan fungsi, pemaknaan kesatuan antara hutan dan lahan dalam konteks kehidupan ekonomi *ulun* Saibatin, di dasarkan juga pada hak kepemilikan dan hak pemanfaatan hutan-lahan. Hak kepemilikan dan hak pakai hutan pada *ulun* Saibatin adalah sebagai berikut: (1) Hutan sebagai lahan subsisten, kepemilikannya umum dan hak pakainya juga umum. Bersifat lintas klen; (2) Hutan sebagai lahan ekonomis klen, kepemilikannya klen dan hak pakainya klen. Bersifat klen oriented. Biasanya merupakan pusaka warisan para *primus*

*interparis* pembuka daerah dan pendiri klen. Kwantitas luasannya tidak pernah bertambah dari generasi ke generasi; (3) Hutan sebagai lahan ekonomis umum (lintas klen), yaitu hutan untuk diambil hasil non kayu-nya (damar, karet, rotan, madu, dll); dan (4) Hutan *repong*, kepemilikannya umum dan hak pengambilan hasilnya juga bersifat umum (lintas klen), bahkan orang asing yang kebetulan sedang berada di hutan tersebut juga diperbolehkan mengambil buah-buahan yang ada.

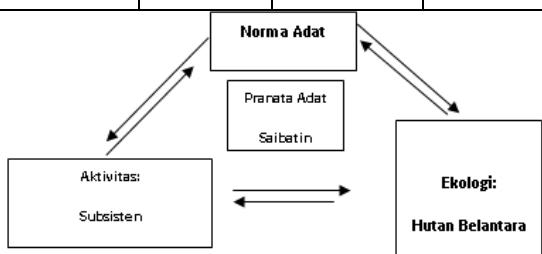
Konsep hutan yang identik dengan habitat pepohonan seharusnya tetaplah terjaga di dalam pemaknaan antara hutan dan lahan pada *ulun* Saibatin yang tinggal di sekitarnya. Pemanfaatan hutan-lahan yang tidak sesuai dengan kedua kategori fungsional tersebut di atas, dahulu dianggap merupakan pelanggaran adat. Sanksi adat akan dijatuhkan pada si pelaku. Pada *ulun* Saibatin, perilaku pemanfaatan yang menyimpang dianggap merusak hutan dan dianggap pula dapat merusak kehidupan budaya dan ekonomi. Bagi *ulun* Saibatin, kehidupan manusia harus selaras (bijaksana) terhadap hutan-lahan.

Pranata adat (*para punyimbang*) pada zaman dahulu mengontrol secara ketat kategori fungsi hutan-lahan di lingkungan kolektif *ulun* Saibatin. Pranata adat kolektif *ulun* Saibatin berfungsi sebagai alat kontrol terhadap relasi antara norma adat Saibatin, kepentingan manusia Saibatin, dan lingkungan ekologinya (hutan-lahan). Namun, dewasa ini kategori tersebut tidaklah ditaati lagi secara ketat karena lemahnya kontrol pranata adat terhadap kategori pemanfaatan (fungsi) hutan.

Melemahnya fungsi ini erat kaitannya dengan adanya perubahan tata masyarakat di Lampung Barat, dari sistem masyarakat adat ke sistem masyarakat desa sesuai dengan UU No.5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa.

**Tabel 1. Kategori Hutan Pada *Ulun Saibatin*:**

Fungsi	Komoditas	Kepemilikan	Hak Pakai	Bentuk
Lahan Subsistens	Bahan Pangan, Kayu Bangunan	Umum (Lintas Klen)	Umum (Lintas Klen)	Ladang Dan Hutan Belantara
Lahan Ekonomis Klen	Kopi, Cengkeh, Lada, dll.	Klen	Klen	Kebun
Lahan Ekonomis Umum (lintas Klen)	Damar, Rotan, Karet, Madu, buah-buahan (non kayu)	Umum (Lintas Klen)	Umum (Lintas Klen)	Hutan Belantara Dan Repong



**Gambar 2. Relasi Aktivitas – Ekologi – Norma Adat Pada *Ulun Saibatin***

## Kerusakan dan Alternatif Pelestarian

Saat terjadi kasus kerusakan hutan, selalu saja penduduk sebagai peladang di sekitarnya yang dituding sebagai pelaku. Entah itu berupa kebakaran hutan maupun terjadinya penggundulan lahan hutan. Hal itu disebabkan oleh sistem perladangan berpindah yang dianggap pemerintah sebagai sumber api kebakaran hutan dan penyebab terjadinya penebangan hutan secara liar. Luas kawasan konversi hutan TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan) di wilayah Lampung Barat secara keseluruhan adalah 356.000 km<sup>2</sup> (Santoso, 2001: 156). Sejak lama sudah berlangsung aktivitas perusakan hutan di kawasan itu. Namun, aktivitas itu dapat dilihat semakin menghebat pada periode tahun 1997–1998 dan berlangsung terus hingga sekarang. Aktivitas perusakan hutan yang dimaksud terutama adalah kasus pencurian kayu dengan cara-cara penebangan liar. Bukti-bukti di lapangan menunjukkan bahwa pada bagian tengah-tengah kawasan hutan TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan) banyak dijumpai areal-areal yang gundul dengan bekas-bekas tebangan pohon-pohon. Sekali lagi perlu ditekankan di sini bahwa kerusakan yang terjadi adalah pada di areal-areal di bagian tengah hutan, bukan pada areal di bagian tepian/pinggir hutan.

Berdasarkan fakta-fakta dilapangan, kita tidak bisa juga menutup mata bahwa ada sebagian dari penduduk lokal ada yang terlibat dalam aktivitas negatif yang berlangsung. Persoalan yang ditemukan dalam proses pengambilan data di lapangan adalah kenyataan bahwa perekonomian penduduk tidak meningkat drastis ataupun membaik setelah adanya kasus penjarahan kayu-kayu hutan. Padahal nilai jual kayu hutan relatif mahal. Fakta baru ini menunjukkan bahwa penduduk lokal yang terlibat bukanlah dalang tunggal dalam kasus

kerusakan hutan. Tentunya membuka peluang besar bahwa ada oknum-oknum dengan kepentingan politis maupun ekonomi yang menjadikan penduduk lokal sebagai alat. Konsekuensinya, yang menerima hukuman bukan dalang yang mengkoordinir, tetapi orang-orang lokal yang menjadi suruhan para oknum.

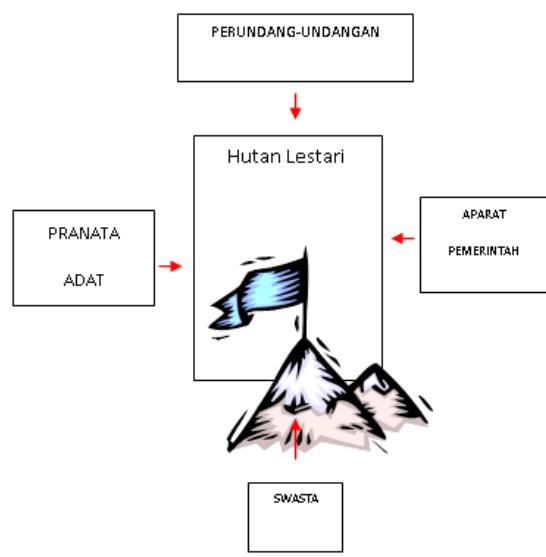
Periode tahun 1997 – 1998 adalah masa puncak berlangsungnya krisis ekonomi di Indonesia. Seluruh sektor kehidupan masyarakat terkena dampaknya. Biaya hidup semakin mahal, dan sementara itu efisiensi dalam bentuk pengurangan tenaga kerja banyak dilakukan oleh sektor industri. Pengangguran meningkat, sedangkan gaya hidup manusia yang biasanya (sebelum periode 1997 – 1998) “serasa” mapan sudah sulit untuk dirubah. Akibatnya jalan pintas dengan cara-cara menerabas aturan seringkali dilakukan agar dengan cepat dapat memperoleh apa yang disebut dengan “uang”.

Salah satu bentuk jalan pintas itu adalah sangat mungkin juga berupa aktivitas pencurian ataupun penjarahan kayu-kayu hutan yang semakin menghebat di dalam TNBBS di Lampung Barat<sup>27</sup>. Aturan tidak lagi dihiraukan, dan aparat negara tak dipandang lagi. Hutan yang dalam konsep orientasi budaya *ulun* Saibatin adalah penyedia “mangsa” bagi kehidupan manusia, berubah menjadi “mangsa” bagi kehidupan manusia. Prinsip keselarasan hidup manusia dengan alam yang digariskan oleh nenek moyang telah dilanggar. *Ulun* Saibatin yang di dalam orientasi budayanya menabu-kan aktivitas menjual kayu hutan, mulai berani secara terang-terangan memperdagangkan kayu hutan. Menurut rumor yang berkembang, seberapa banyakpun jumlah kayu yang berhasil disediakan oleh seseorang, akan dengan mudah terjual secara tunai. Pembeli biasanya adalah orang-orang yang datang dari luar Lampung Barat.

Masyarakat komunal yang masih memegang teguh orientasi budaya

kolektifnya adalah orang-orang anggota keluarga inti dari kolektif tersebut. Bila berpijak dari asumsi ini, tidaklah mungkin kerusakan hutan di kawasan konversi TNBBS disebabkan oleh aktivitas pertanian ladang berpindah. Hal ini mengingat bahwa yang melakukan aktivitas berladang adalah keluarga penduduk inti dari *pekon/tyuh*. Sebagaimana sudah disebutkan di atas, orientasi budaya *ulun* Saibatin adalah kehidupan yang selaras dengan alam, bukan kehidupan yang “memangsa” alam, sehingga Michon dan Boprard (1986) memuji-muji *ulun* Saibatin di Krui karena cara mereka berkebun damar dan *repong* (*agroforestry*) yang sangat fungsional, menyatu dengan ekosistem kehidupan jagat mereka.

Kerusakan hutan dewasa ini, sebagian besar sifatnya lebih disebabkan oleh problem pengangguran penduduk pada daerah di lingkungan sebuah kawasan hutan. Pendekatan budaya dengan demikian akan lebih mengena, apabila pemerintah juga turut melibatkan pihak swasta (terutama pengusaha HPH setempat bila ada), untuk berpartisipasi memecahkan problem pengangguran di daerah-daerah yang berada dalam sebuah kawasan hutan.



### **Gambar 3. Alternatif Struktur Pelestarian Hutan:**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa kesimpulan yang bisa kita ketengahkan di sini, yaitu: *pertama*, adalah bahwa kerusakan hutan di Taman Nasional Bukit Barisan (TNBBS) di Lampung Barat bukanlah disebabkan oleh aktivitas ekonomi asli *ulun* Saibatin di daerah tersebut, baik itu aktivitas ekonomi mereka yang bersifat subsisten, yang bersifat ekonomis, maupun yang bersifat gabungan antara subsisten dan ekonomis. Orientasi budaya *ulun* Saibatin yang menggerakkan ketiga aktivitas ekonomi asli *ulun* Saibatin tersebut tidak pernah memandang hutan sebagai “mangsa” bagi kehidupan ekonomi mereka, tetapi lebih memandang hutan sebagai penyedia “mangsa” bagi kehidupan ekonomi mereka. Orientasi budaya *ulun* Saibatin adalah kehidupan yang selaras dengan alam.

*Kedua*, Kerusakan hutan TNBBS di Lampung Barat bukan pula disebabkan oleh aktivitas pengusaha HPH yang tidak bertanggung jawab di daerah itu, karena di TNBBS Lampung Barat tidak terdapat satu unit-pun usaha HPH. Kerusakan hutan yang terjadi lebih disebabkan kasus pencurian maupun menjarahan yang intensitasnya sangat meningkat sejak periode 1997 – 1998 (bertepatan dengan krisis ekonomi yang memuncak di negeri ini), yang dilakukan oleh penebang-penebang liar, sebagai dampak dari kondisi kesulitan ekonomi dari para pelaku penjarahan kayu hutan tersebut. Pelaku penjarahan bukanlah penduduk inti desa dari banyak pekon/tiyu *ulun* Saibatin yang ada di Lampung Barat, meskipun tidak menutup kemungkinan pelakunya melibatkan sebagian dari anggota-anggota klen mereka yang pulang kampung akibat krisis ekonomi yang berdampak pada kesulitan hidup mereka di daerah rantau.

*Ketiga*, Perundang-Undangan kehutanan yang berlaku maupun keberadaan aparat pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan di TNBBS Lampung Barat, ternyata kurang banyak berarti karena penjarahan masih saja terjadi dan lolos dari pantauan. Ada baiknya pemerintah menempuh pendekatan budaya untuk paling tidak dapat mengurangi kasus-kasus penjarahan kayu hutan di kawasan TNBBS Lampung Barat. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pada masa norma adat Saibatin masih berlaku dan wewenang pranata adat masih ada, di dalam mengatur interaksi antara penduduk dengan hutan yang ada di Lampung Barat, kasus-kasus penjarahan hutan dapat diminimalkan. Bahkan, masing-masing pada diri *ulun* Saibatin ada rasa tanggung jawab sebagai “pengawal” kelestarian hutan, mengingat bahwa hutan identik dengan kehidupan *ulun* Saibatin.

*Keempat*, problem pengangguran penduduk yang tinggal di sekitar kawasan konversi hutan perlu segera diatasi. Pemerintah dapat menggandeng pihak swasta (terutama bila di daerah setempat terdapat usaha HPH) untuk diajak turut serta mengatasi masalah-masalah pengangguran di daerah yang berada di sekitar kawasan konversi hutan. Adanya kelengkapan pendekatan secara ekonomi ini, memungkinkan pendekatan budaya yang diterapkan akan lebih mengena.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Gazalba, Sidi. 1979. *Kebudayaan Sebagai Ilmu*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Giddens, Anthony. 1991. *Sociology*. Cambridge: Polity Press.
- Goldmann, Lucien. 1973. *Genetic Structuralism in the Sociology of Literature*. Harmondsworth: Penguin.

Imron, Ali, *Perubahan Pola Perkawinan Bujujokh dan Semenda Pada Masyarakat Saibatin Lampung Barat*, Tesis Program Pascasarjana UGM, 2001.

Junus, Umar. 1986. *Sosiologi Sastra, Persoalan Teori dan Metode*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.

Koentjaraningrat. 1975. *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.

Kuntowijoyo. 1999. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Lahajir. 2001 *Etnologi Perladangan Orang Dayak Tunjung Linggang*. Yogyakarta: Galang Press.

*Hahiwang Harhong Nunas* yaitu sebuah syair tradisi lisan mengenai *Haghong*= arang/cikal bakal, *Nunas*= tunas/generasi keturunan dari *Penggawa Lima*, sebagai *Primus Interparis* dan leluhur *ulun Krui* di Lampung Barat.

Santoso, Harianto, F. 2001. *Profil Daerah Kabupaten dan Kota*. Jakarta.

Spradey P. James. 1997. *Metode Etnografi*, Terj. *The Etnographic Interview*, Misbah Zulfa Elizabeth. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

Zoetmulder, P.J. 1951. *Cultuur, Oost and West*. Amsterdam: P.J. van der Peet.



 **Media Edukasi**  
**INDONESIA**

ISBN 978-623-90565-5-1



9 786239 056551